

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sepele dari harta kekayaan yang dimiliki Wakif, baik berupa tanah, uang, dan lain-lain, yang penggunaannya dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut pelaksanaan serta pengelolaan perwakafan tanah masih sangat sederhana dan tidak terprosedur dengan baik, akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang tersebut pelaksanaannya serta pengelolaannya sudah terprosedur dengan baik. Disamping itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini terdengar asing bagi masyarakat dan hal ini menimbulkan pelaksanaan, pendaftarannya serta pengelolaannya Wakaf jauh dari ketentuan hukum yang sudah berlaku. Maka dari itu penulis memiliki tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan serta pengelolaan Perwakafan Tanah di Kec Bojong Kabupaten Tegal sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf atau belum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative, dalam penelitian ini dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemecahan masalah. Bahan hukum yang diperoleh sebagian besar dari Undang-undang, peraturan pemerintah, serta pendapat para ahli dan hasil penelitian yang didapat melalui studi lapangan dan kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih sangat jauh dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan dalam pelaksanaannya disini masih menggunakan peraturan yang lama karena belum tersosialisasikannya dengan baik Undang-undang yang berlaku padamasyarakat. Dan dalam pengelolaannya sebagian besar mengarah pada sarana peribafahan dan jarang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Serta ada kendala yang dihadapi dalam permasalahan ini yaitu dalam bukti kepemilikan tanah yang sulit dipecahkan karena kurang terprosedurnya bukti-bukti kepemilikan dari awal sampai akhir tanah tersebut diperjual belikan.

Kata kunci : Wakaf, Tanah, Pelaksanaan.

ABSTRACT

Waqf is one of the legal actions of a person or legal entity separated by assets owned by the Wakif, whether in the form of land, money, etc. whose use and implementation are regulated in Act 41 of 2004 concerning Endowments. Before the birth of the Act which was previously implemented and the management of land parcels was still very simple and not well-structured, but after the birth of the Act the implementation and management were well-procedureed. Besides that, Law Number 41 Year 2004 was issued by the public and this involved the implementation, registration and management of the Waqf far from existing legal provisions. Therefore, the writer has the purpose in discussing this thesis to find out the implementation and management of Land Representation in Bojong Subdistrict, Tegal Regency, based on Law Number 41 of 2004 concerning Endowments or not.

The research method used in the discussion of this thesis is juridical normative, in this study conducted through legislation in force as a solution to the problem. Legal materials are obtained mostly from laws, government regulations, as well as expert opinions and research results obtained through field studies and literature.

From the results of this study is to show the implementation of m, compassion is very far from Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and in its implementation here it still uses the old regulations because they have not been socialized with laws that invite the public. And in its management, most of it is in the facility of alms and not enough to empower the economy of the surrounding community. And there are those who lend in this claim is in the proof of ownership of land that is difficult to solve because there is no procedural proof of ownership from the beginning to the end of the land traded.

Keywords: Waqf, Land, Implementation.